

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta

10120 0213457925

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1A UU KUP)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu Surat Tagihan Pajak;
2. Surat kuasa khusus dalam hal Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
3. Fotokopi surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi dokumen persyaratan
2. Permohonan dapat diajukan langsung melalui loket TPT
3. Permohonan dapat diajukan melalui jasa ekspedisi/pengiriman

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Jl. Batu Tulis Raya No.53, RT.3/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta

10120 0213457925

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat

Telepon : (021) 134 ; 1500200

Faksimile : (021) 5251245

Email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id) ; [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) Twitter : @kring\_pajak

Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) ; [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id) ; [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

Chat Pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.